MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47/Permentan/SR.310/12/2017
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dilakukan penambahan luas areal tanam baru;

b. bahwa pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;

c. bahwa agar penerapan pemupukan berimbang oleh petani dapat berjalan optimal, diperlukan kebijakan subsidi pupuk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budi daya ikan dan/atau udang, termasuk pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung, dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.

4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
9. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV.
10. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.

11. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
12. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh paling kurang oleh satu anggota tim yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan.
13. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
15. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
17. Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.
18. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian, penyaluran, dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI DAN

PENGUSULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUDSIDI

Pasal 3

(1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

(2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA, dan NPK.

Pasal 4

Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.

(2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RDKK sebagai berikut:

a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan/atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;

b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau

c. Petani (petambak) yang melakukan usaha sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

(3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budi daya.

Pasal 6

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan, seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 7

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi per provinsi.

(3) Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator pengusulan Pupuk Bersubsidi wilayah provinsi untuk semua sub sektor.

(4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.

(5) Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2018.

Pasal 8

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi.

(3) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator pengusulan Pupuk Bersubsidi wilayah kabupaten/kota untuk semua sub sektor.

(4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.

(5) Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2018.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

(1) Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 terjadi kekurangan atau kelebihan, pemenuhan Pupuk Bersubsidi dipenuhi melalui realokasi antar wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.

(2) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

b. realokasi antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi,

c. realokasi antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4) Kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1) Penetapan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. serapan pupuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
b. rencana luas tanam; dan/atau
c. dosis spesifik wilayah.

(2) Penetapan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketersediaan alokasi Pupuk Bersubsidi.

BAB V
HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

(1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani dan/atau Kelompok Tani di Pengecer Resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg; dan
- Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 12

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan nonsubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 13

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Kartu Tani.
(3) Penerapan penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada wilayah kabupaten/kota tertentu sebagai ujicoba.
(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kartu Tani pada wilayah tertentu sebagai uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

(1) Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana Pasal 13 dilakukan Verifikasi dan/atau Validasi.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Verifikasi dan/atau Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 47/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	75,420	22,040	11,480	49,110	13,840
2	SUMATERA UTARA	169,110	48,740	51,610	128,080	31,790
3	SUMATERA BARAT	72,990	27,680	15,660	59,110	15,920
4	J A M B I	28,950	18,780	7,940	48,700	6,640
5	R I A U	35,260	13,370	10,560	50,080	8,020
6	BENGKULU	21,820	8,010	4,720	28,880	5,090
7	SUMATERA SELATAN	155,070	43,550	5,330	100,590	15,600
8	BANGKA BELITUNG	19,070	3,920	2,330	19,390	5,720
9	LAMPUNG	257,790	45,150	17,980	153,140	28,420
10	KEP. RIAU	90	20	20	200	100
1	DKI. JAKARTA	150	40	-	70	100
12	BANTEN	65,540	20,830	1,530	27,100	7,410
13	JAWA BARAT	556,010	153,780	70,410	330,160	50,290
14	D.I. YOGYAKARTA	43,110	3,700	10,000	25,070	12,370
15	JAWA TENGAH	763,140	162,970	220,630	421,920	263,330
16	JAWA TIMUR	1,111,590	162,420	501,850	608,090	424,720
17	B A L I	43,010	1,830	6,000	23,790	21,800
18	KALIMANTAN BARAT	34,350	12,690	3,470	86,770	19,100
19	KALIMANTAN TENGAH	16,720	4,250	1,400	34,710	2,770
20	KALIMANTAN SELATAN	37,930	7,350	1,440	39,060	5,830
21	KALIMANTAN TIMUR	17,330	4,570	2,340	28,590	1,650
22	KALIMANTAN UTARA	1,210	150	100	3,000	300
23	SULAWESI UTARA	19,030	3,950	460	13,090	1,830
24	GORONTALO	21,940	1,300	630	18,280	1,000
25	SULAWESI TENGAH	31,600	3,350	8,760	30,130	4,630
6	SULAWESI TENGGARA	20,800	7,190	4,090	16,230	5,780
27	SULAWESI SELATAN	277,880	41,100	64,380	112,800	25,140
28	SULAWESI BARAT	25,180	2,170	7,120	19,490	1,250
29	NUSA TENGGARA BARAT	143,720	17,350	15,050	45,320	12,880
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23,440	4,820	1,640	15,490	3,110
31	MALUKU	2,650	200	150	2,730	600
32	PAPUA	6,270	2,390	530	6,930	1,950
33	MALUKU UTARA	610	120	250	1,740	660
34	PAPUA BARAT	1,220	220	140	2,160	160
JUMLAH		4,100,000	850,000	1,050,000	2,550,000	1,000,000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 47/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	75,420	22,040	11,480	49,110	13,830
2	SUMATERA UTARA	169,110	48,740	51,610	128,080	31,190
3	SUMATERA BARAT	72,990	27,680	15,660	59,110	15,920
4	J A M B I	28,950	18,780	7,940	48,700	6,040
5	R I A U	35,260	13,370	10,560	50,080	8,020
6	BENGKULU	21,820	8,010	4,720	28,880	5,090
7	SUMATERA SELATAN	155,070	43,550	5,330	100,590	15,600
8	BANGKA BELITUNG	19,070	3,920	2,330	19,390	5,220
9	LAMPUNG	257,790	45,150	17,980	153,140	28,420
10	KEP. RIAU	90	20	20	200	100
11	DKI. JAKARTA	150	40	-	70	100
12	BANTEN	65,540	20,830	1,530	27,100	7,010
13	JAWA BARAT	556,010	153,780	70,410	330,160	50,740
14	D.I. YOGYAKARTA	43,110	3,700	10,000	25,070	1,220
15	JAWA TENGAH	763,140	162,970	220,630	421,920	261,330
16	JAWA TIMUR	1,111,590	162,420	501,850	608,090	424,120
17	B A L I	43,010	1,830	6,000	23,790	21,500
18	KALIMANTAN BARAT	34,350	12,690	3,470	86,770	19,100
19	KALIMANTAN TENGAH	16,720	4,250	1,400	34,710	2,270
20	KALIMANTAN SELATAN	37,930	7,350	1,440	39,060	3,850
21	KALIMANTAN TIMUR	17,330	4,570	2,340	28,590	1,000
22	KALIMANTAN UTARA	1,210	150	100	3,000	500
23	SULAWESI UTARA	19,030	3,950	460	13,090	1,830
24	GORONTALO	21,940	1,300	630	18,280	1,000
25	SULAWESI TENGAH	31,600	3,350	8,760	30,130	4,030
26	SULAWESI TENGGARA	20,800	7,190	4,090	16,230	5,780
27	SULAWESI SELATAN	277,880	41,100	64,380	112,800	25,140
28	SULAWESI BARAT	25,180	2,170	7,120	19,490	1,250
29	NUSA TENGGARA BARAT	143,720	17,350	15,050	45,320	12,880
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23,440	4,820	1,640	15,490	3,110
31	MALUKU	2,650	200	150	2,730	500
32	PAPUA	6,270	2,390	530	6,930	1,500
33	MALUKU UTARA	610	120	250	1,740	500
34	PAPUA BARAT	1,220	220	140	2,160	1,000
JUMLAH		4,100,000	850,000	1,050,000	2,550,000	1,000,000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 47/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	75,420	22,040	11,480	49,110	13,940
2	SUMATERA UTARA	169,110	48,740	51,610	128,080	31,760
3	SUMATERA BARAT	72,990	27,680	15,660	59,110	15,920
4	J A M B I	28,950	18,780	7,940	48,700	6,640
5	R I A U	35,260	13,370	10,560	50,080	8,020
6	BENGKULU	21,820	8,010	4,720	28,880	5,280
7	SUMATERA SELATAN	155,070	43,550	5,330	100,590	15,060
8	BANGKA BELITUNG	19,070	3,920	2,330	19,390	3,420
9	LAMPUNG	257,790	45,150	17,980	153,140	28,420
10	KEP. RIAU	90	20	20	200	100
11	DKI. JAKARTA	150	40	-	70	100
12	BANTEN	65,540	20,830	1,530	27,100	7,110
13	JAWA BARAT	556,010	153,780	70,410	330,160	50,240
14	D.I. YOGYAKARTA	43,110	3,700	10,000	25,070	12,120
15	JAWA TENGAH	763,140	162,970	220,630	421,920	268,190
16	JAWA TIMUR	1,111,590	162,420	501,850	608,090	428,250
17	B A L I	43,010	1,830	6,000	23,790	21,370
18	KALIMANTAN BARAT	34,350	12,690	3,470	86,770	19,100
19	KALIMANTAN TENGAH	16,720	4,250	1,400	34,710	7,220
20	KALIMANTAN SELATAN	37,930	7,350	1,440	39,060	5,830
21	KALIMANTAN TIMUR	17,330	4,570	2,340	28,590	1,650
22	KALIMANTAN UTARA	1,210	150	100	3,000	300
23	SULAWESI UTARA	19,030	3,950	460	13,090	1,850
24	GORONTALO	21,940	1,300	630	18,280	1,000
25	SULAWESI TENGAH	31,600	3,350	8,760	30,130	4,030
26	SULAWESI TENGGARA	20,800	7,190	4,090	16,230	3,690
27	SULAWESI SELATAN	277,880	41,100	64,380	112,800	25,140
28	SULAWESI BARAT	25,180	2,170	7,120	19,490	3,250
29	NUSA TENGGARA BARAT	143,720	17,350	15,050	45,320	12,850
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23,440	4,820	1,640	15,490	4,610
31	MALUKU	2,650	200	150	2,730	470
32	PAPUA	6,270	2,390	530	6,930	1,880
33	MALUKU UTARA	610	120	250	1,740	280
34	PAPUA BARAT	1,220	220	140	2,160	260
JUMLAH		4,100,000	850,000	1,050,000	2,550,000	1,000,000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 47/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	75,420	22,040	11,480	49,110	13,640
2	SUMATERA UTARA	169,110	48,740	51,610	128,080	31,790
3	SUMATERA BARAT	72,990	27,680	15,660	59,110	15,220
4	J A M B I	28,950	18,780	7,940	48,700	6,040
5	R I A U	35,260	13,370	10,560	50,080	8,020
6	BENGKULU	21,820	8,010	4,720	28,880	5,190
7	SUMATERA SELATAN	155,070	43,550	5,330	100,590	15,040
8	BANGKA BELITUNG	19,070	3,920	2,330	19,390	3,220
9	LAMPUNG	257,790	45,150	17,980	153,140	28,120
10	KEP. RIAU	90	20	20	200	100
11	DKI. JAKARTA	150	40	-	70	100
12	BANTEN	65,540	20,830	1,530	27,100	7,010
13	JAWA BARAT	556,010	153,780	70,410	330,160	59,290
14	D.I. YOGYAKARTA	43,110	3,700	10,000	25,070	12,370
15	JAWA TENGAH	763,140	162,970	220,630	421,920	263,330
16	JAWA TIMUR	1,111,590	162,420	501,850	608,090	424,220
17	B A L I	43,010	1,830	6,000	23,790	21,800
18	KALIMANTAN BARAT	34,350	12,690	3,470	86,770	19,300
19	KALIMANTAN TENGAH	16,720	4,250	1,400	34,710	2,770
20	KALIMANTAN SELATAN	37,930	7,350	1,440	39,060	5,830
21	KALIMANTAN TIMUR	17,330	4,570	2,340	28,590	1,650
22	KALIMANTAN UTARA	1,210	150	100	3,000	900
23	SULAWESI UTARA	19,030	3,950	460	13,090	1,830
24	GORONTALO	21,940	1,300	630	18,280	1,000
25	SULAWESI TENGAH	31,600	3,350	8,760	30,130	1,660
26	SULAWESI TENGGARA	20,800	7,190	4,090	16,230	5,280
27	SULAWESI SELATAN	277,880	41,100	64,380	112,800	25,140
28	SULAWESI BARAT	25,180	2,170	7,120	19,490	2,250
29	NUSA TENGGARA BARAT	143,720	17,350	15,050	45,320	12,880
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23,440	4,820	1,640	15,490	3,610
31	MALUKU	2,650	200	150	2,730	680
32	PAPUA	6,270	2,390	530	6,930	1,880
33	MALUKU UTARA	610	120	250	1,740	600
34	PAPUA BARAT	1,220	220	140	2,160	1,260
JUMLAH		4,100,000	850,000	1,050,000	2,550,000	1,000,000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran II. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 47/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4,100,000	432,557	332,418	335,941	360,321	366,670	322,950	217,589	244,304	231,057	270,905	421,349	563,939
SP-36	850,000	123,867	69,532	86,887	91,447	79,032	59,751	36,552	42,696	49,183	50,893	80,478	79,682
ZA	1,050,000	128,955	84,235	99,123	89,453	85,443	87,909	51,304	69,546	71,892	70,458	107,532	104,150
NPK	2,550,000	282,141	206,955	251,406	254,181	237,755	203,997	129,010	153,374	161,406	161,526	255,953	252,296
ORGANIK	1,000,000	83,199	67,228	106,845	104,829	93,674	78,621	48,841	68,167	72,692	72,495	106,163	97,246
JUMLAH PUPUK	9,550,000	1,050,719	760,368	880,202	900,231	862,574	753,228	483,296	578,087	586,230	626,277	971,475	1,097,313

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 47/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4,100,000	432,557	332,418	335,941	360,321	366,670	322,950	217,589	244,304	231,057	270,905	421,349	563,939
SP-36	850,000	123,867	69,532	86,887	91,447	79,032	59,751	36,552	42,696	49,183	50,893	80,478	79,682
ZA	1,050,000	128,955	84,235	99,123	89,453	85,443	87,909	51,304	69,546	71,892	70,458	107,532	104,150
NPK	2,550,000	282,141	206,955	251,406	254,181	237,755	203,997	129,010	153,374	161,406	161,526	255,953	252,296
ORGANIK	1,000,000	83,199	67,228	106,845	104,829	93,674	78,621	48,841	68,167	72,692	72,495	106,163	97,246
JUMLAH PUPUK	9,550,000	1,050,719	760,368	880,202	900,231	862,574	753,228	483,296	578,087	586,230	626,277	971,475	1,097,313

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 47/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4,100,000	432,557	332,418	335,941	360,321	366,670	322,950	217,589	244,304	231,057	270,905	421,349	563,939
SP-36	850,000	123,867	69,532	86,887	91,447	79,032	59,751	36,552	42,696	49,183	50,893	80,478	79,682
ZA	1,050,000	128,955	84,235	99,123	89,453	85,443	87,909	51,304	69,546	71,892	70,458	107,532	104,150
NPK	2,550,000	282,141	206,955	251,406	254,181	237,755	203,997	129,010	153,374	161,406	161,526	255,953	252,296
ORGANIK	1,000,000	83,199	67,228	106,845	104,829	93,674	78,621	48,841	68,167	72,692	72,495	106,163	97,246
JUMLAH PUPUK	9,550,000	1,050,719	760,368	880,202	900,231	862,574	753,228	483,296	578,087	586,230	626,277	971,475	1,097,313

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4,100,000	432,557	332,418	335,941	360,321	366,670	322,950	217,589	244,304	231,057	270,905	421,349	563,939
SP-36	850,000	123,867	69,532	86,887	91,447	79,032	59,751	36,552	42,696	49,183	50,893	80,478	79,682
ZA	1,050,000	128,955	84,235	99,123	89,453	85,443	87,909	51,304	69,546	71,892	70,458	107,532	104,150
NPK	2,550,000	282,141	206,955	251,406	254,181	237,755	203,997	129,010	153,374	161,406	161,526	255,953	252,296
ORGANIK	1,000,000	83,199	67,228	106,845	104,829	93,674	78,621	48,841	68,167	72,692	72,495	106,163	97,246
JUMLAH PUPUK	9,550,000	1,050,719	760,368	880,202	900,231	862,574	753,228	483,296	578,087	586,230	626,277	971,475	1,097,313

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 19/Permentan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	75,420	7,957	6,115	6,180	6,628	6,745	5,941	4,003	4,494	4,250	4,983	7,751	10,373
2	SUMATERA UTARA	169,110	17,841	13,711	13,856	14,862	15,124	13,321	8,975	10,077	9,530	11,174	17,379	23,260
3	SUMATERA BARAT	72,990	7,701	5,918	5,981	6,415	6,528	5,749	3,874	4,349	4,113	4,823	7,501	10,038
4	J A M B I	28,950	3,054	2,347	2,372	2,544	2,589	2,280	1,536	1,725	1,632	1,913	2,975	3,983
5	R I A U	35,260	3,720	2,859	2,889	3,099	3,153	2,777	1,871	2,101	1,987	2,330	3,624	4,850
6	BENGKULU	21,820	2,302	1,769	1,788	1,918	1,951	1,719	1,158	1,300	1,230	1,442	2,242	3,001
7	SUMATERA SELATAN	155,070	16,360	12,573	12,706	13,628	13,868	12,215	8,230	9,240	8,739	10,246	15,936	21,329
8	BANGKA BELITUNG	19,070	2,012	1,546	1,563	1,676	1,705	1,502	1,012	1,136	1,075	1,260	1,960	2,623
9	LAMPUNG	257,790	27,197	20,901	21,122	22,655	23,055	20,306	13,681	15,361	14,528	17,033	26,492	35,459
10	KEP. RIAU	90	9	7	7	8	8	7	5	5	5	6	10	13
11	DKI. JAKARTA	150	16	12	12	13	13	12	8	9	8	10	16	21
12	BANTEN	65,540	6,915	5,314	5,370	5,760	5,861	5,162	3,478	3,905	3,694	4,331	6,735	9,015
13	JAWA BARAT	556,010	58,660	45,080	45,558	48,864	49,725	43,796	29,508	33,131	31,334	36,738	57,140	76,476
14	D.I. YOGYAKARTA	43,110	4,548	3,495	3,532	3,789	3,855	3,396	2,288	2,569	2,430	2,848	4,430	5,930
15	JAWA TENGAH	763,140	80,512	61,874	62,529	67,067	68,250	60,111	40,500	45,473	43,007	50,424	78,426	104,967
16	JAWA TIMUR	1,111,590	117,274	90,125	91,080	97,690	99,412	87,558	58,992	66,235	62,645	73,447	114,236	152,896
17	B A L I	43,010	4,538	3,487	3,524	3,780	3,846	3,388	2,283	2,563	2,424	2,842	4,420	5,915
18	KALIMANTAN BARAT	34,350	3,624	2,785	2,815	3,019	3,072	2,706	1,823	2,047	1,936	2,270	3,529	4,724
19	KALIMANTAN TENGAH	16,720	1,764	1,356	1,370	1,469	1,495	1,317	887	996	942	1,105	1,719	2,300
20	KALIMANTAN SELATAN	37,930	4,002	3,075	3,108	3,333	3,392	2,988	2,013	2,260	2,138	2,506	3,898	5,217
21	KALIMANTAN TIMUR	17,330	1,828	1,405	1,420	1,523	1,550	1,365	920	1,033	977	1,145	1,780	2,384
22	KALIMANTAN UTARA	1,210	128	98	99	106	108	95	64	72	68	80	125	167
23	SULAWESI UTARA	19,030	2,008	1,543	1,559	1,672	1,702	1,499	1,010	1,134	1,072	1,257	1,956	2,618
24	GORONTALO	21,940	2,315	1,779	1,798	1,928	1,962	1,728	1,164	1,307	1,236	1,450	2,255	3,018
25	SULAWESI TENGAH	31,600	3,334	2,562	2,589	2,777	2,826	2,489	1,677	1,883	1,781	2,088	3,248	4,346
26	SULAWESI TENGGARA	20,800	2,194	1,686	1,704	1,828	1,860	1,638	1,104	1,239	1,172	1,374	2,139	2,862
27	SULAWESI SELATAN	277,880	29,317	22,530	22,769	24,421	24,852	21,888	14,747	16,558	15,660	18,361	28,556	38,221
28	SULAWESI BARAT	25,180	2,657	2,042	2,063	2,213	2,252	1,983	1,336	1,500	1,419	1,664	2,588	3,463
29	NUSA TENGGARA BARAT	143,720	15,163	11,653	11,776	12,631	12,853	11,321	7,627	8,564	8,099	9,496	14,769	19,768
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23,440	2,473	1,900	1,921	2,060	2,096	1,846	1,244	1,397	1,321	1,549	2,409	3,224
31	MALUKU	2,650	280	215	217	233	237	209	141	158	149	175	272	364
32	PAPUA	6,270	661	508	514	551	561	494	333	374	353	414	645	862
33	MALUKU UTARA	610	64	49	50	54	55	48	32	36	34	40	64	84
34	PAPUA BARAT	1,220	129	99	100	107	109	96	65	73	69	81	124	168
JUMLAH PROPINSI		4,100,000	432,557	332,418	335,941	360,321	366,670	322,950	217,589	244,304	231,057	270,905	421,349	563,939

47/Permentan/SR.310/12/2017
20 Desember 2017

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	22,040	3,212	1,803	2,253	2,371	2,049	1,549	948	1,107	1,275	1,320	2,087	2,066
2	SUMATERA UTARA	48,740	7,103	3,987	4,982	5,244	4,532	3,426	2,096	2,448	2,820	2,918	4,615	4,569
3	SUMATERA BARAT	27,680	4,034	2,264	2,830	2,978	2,574	1,946	1,190	1,390	1,602	1,657	2,620	2,595
4	J A M B I	18,780	2,737	1,536	1,920	2,020	1,746	1,320	808	943	1,087	1,124	1,779	1,760
5	R I A U	13,370	1,948	1,094	1,367	1,438	1,243	940	575	672	774	801	1,265	1,253
6	BENGKULU	8,010	1,167	655	819	862	745	563	344	402	463	480	759	751
7	SUMATERA SELATAN	43,550	6,347	3,563	4,452	4,685	4,049	3,061	1,873	2,188	2,520	2,607	4,123	4,082
8	BANGKA BELITUNG	3,920	571	321	401	422	364	276	169	197	227	235	370	367
9	LAMPUNG	45,150	6,580	3,693	4,615	4,857	4,198	3,174	1,941	2,268	2,612	2,703	4,276	4,233
10	KEP. RIAU	20	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
11	DKI. JAKARTA	40	6	3	4	4	4	3	2	2	2	2	4	4
12	BANTEN	20,830	3,036	1,704	2,129	2,241	1,937	1,464	896	1,046	1,205	1,247	1,972	1,953
13	JAWA BARAT	153,780	22,410	12,580	15,720	16,544	14,299	10,810	6,613	7,725	8,898	9,207	14,559	14,415
14	D.I. YOGYAKARTA	3,700	539	303	378	398	344	260	159	186	214	222	350	347
15	JAWA TENGAH	162,970	23,749	13,331	16,659	17,533	15,153	11,456	7,008	8,186	9,430	9,758	15,430	15,277
16	JAWA TIMUR	162,420	23,669	13,286	16,603	17,474	15,102	11,418	6,984	8,159	9,398	9,725	15,377	15,225
17	B A L I	1,830	267	150	187	197	170	129	79	92	106	110	172	171
18	KALIMANTAN BARAT	12,690	1,849	1,038	1,297	1,365	1,180	892	546	637	734	760	1,201	1,191
19	KALIMANTAN TENGAH	4,250	619	348	434	457	395	299	183	213	246	254	403	399
20	KALIMANTAN SELATAN	7,350	1,071	601	751	791	683	517	316	369	425	440	696	690
21	KALIMANTAN TIMUR	4,570	666	374	467	492	425	321	197	230	264	274	432	428
22	KALIMANTAN UTARA	150	22	12	15	16	14	11	6	8	9	9	14	14
23	SULAWESI UTARA	3,950	576	323	404	425	367	278	170	198	229	236	374	370
24	GORONTALO	1,300	189	106	133	140	121	91	56	65	75	78	124	122
25	SULAWESI TENGAH	3,350	488	274	342	360	311	235	144	168	194	201	318	315
26	SULAWESI TENGGARA	7,190	1,048	588	735	774	669	505	309	361	416	430	681	674
27	SULAWESI SELATAN	41,100	5,989	3,362	4,201	4,422	3,821	2,889	1,767	2,065	2,378	2,461	3,891	3,854
28	SULAWESI BARAT	2,170	316	178	222	233	202	153	93	109	126	130	205	203
29	NUSA TENGGARA BARAT	17,350	2,528	1,419	1,774	1,867	1,613	1,220	746	872	1,004	1,039	1,642	1,626
30	NUSA TENGGARA TIMUR	4,820	702	394	493	519	448	339	207	242	279	289	456	452
31	MALUKU	200	29	16	20	22	19	14	9	10	12	12	19	18
32	PAPUA	2,390	348	196	244	257	222	168	103	120	138	143	227	224
33	MALUKU UTARA	120	17.0	10	12.0	13.0	11.0	8.0	5.0	6.0	7.0	7.0	13	11.0
34	PAPUA BARAT	220	32	18	22	24	20	15	9	11	13	13	22	21
	JUMLAH PROPINSI	850,000	123,867	69,532	86,887	91,447	79,032	59,751	36,552	42,696	49,183	50,893	80,478	79,682

Nomor : 47/Pementan/SR.310/12/2017
Tanggal : 19 Desember 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	11,480	1,410	921	1,084	978	934	961	561	760	786	770	1,176	1,139
2	SUMATERA UTARA	51,610	6,339	4,140	4,872	4,397	4,200	4,321	2,522	3,418	3,534	3,463	5,285	5,119
3	SUMATERA BARAT	15,660	1,923	1,256	1,478	1,334	1,274	1,311	765	1,037	1,072	1,051	1,605	1,554
4	J A M B I	7,940	975	637	750	676	646	665	388	526	544	533	812	788
5	R I A U	10,560	1,297	847	997	900	859	884	516	699	723	709	1,082	1,047
6	BENGKULU	4,720	580	379	446	402	384	395	231	313	323	317	482	468
7	SUMATERA SELATAN	5,330	655	428	503	454	434	446	260	353	365	358	545	529
8	BANGKA BELITUNG	2,330	286	187	220	199	190	195	114	154	160	156	238	231
9	LAMPUNG	17,980	2,208	1,442	1,697	1,532	1,463	1,505	879	1,191	1,231	1,206	1,842	1,784
10	KEP. RIAU	20	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1,530	188	123	144	130	125	128	75	101	105	103	156	152
13	JAWA BARAT	70,410	8,648	5,648	6,647	5,998	5,730	5,895	3,440	4,664	4,821	4,725	7,210	6,984
14	D.I. YOGYAKARTA	10,000	1,228	802	944	852	814	837	489	662	685	671	1,024	992
15	JAWA TENGAH	220,630	27,097	17,700	20,828	18,796	17,954	18,472	10,780	14,614	15,106	14,805	22,595	21,883
16	JAWA TIMUR	501,850	61,636	40,260	47,377	42,754	40,839	42,017	24,521	33,240	34,360	33,675	51,396	49,775
17	B A L I	6,000	737	481	566	511	488	502	293	397	411	403	615	596
18	KALIMANTAN BARAT	3,470	426	278	328	296	282	291	170	230	238	233	354	344
19	KALIMANTAN TENGAH	1,400	172	112	132	119	114	117	68	93	96	94	144	139
20	KALIMANTAN SELATAN	1,440	177	116	136	123	117	121	70	95	99	97	147	142
21	KALIMANTAN TIMUR	2,340	287	188	221	199	190	196	114	155	160	157	241	232
22	KALIMANTAN UTARA	100	12	8	9	9	8	8	5	7	7	7	10	10
23	SULAWESI UTARA	460	56	37	43	39	37	39	22	30	32	31	48	46
24	GORONTALO	630	77	51	59	54	51	53	31	42	43	42	65	62
25	SULAWESI TENGAH	8,760	1,076	703	827	746	713	733	428	580	600	588	896	870
26	SULAWESI TENGGARA	4,090	502	328	386	348	333	342	200	271	280	274	420	406
27	SULAWESI SELATAN	64,380	7,907	5,165	6,078	5,485	5,239	5,390	3,146	4,264	4,408	4,320	6,593	6,385
28	SULAWESI BARAT	7,120	874	571	672	607	579	596	348	472	487	478	729	707
29	NUSA TENGGARA BARAT	15,050	1,848	1,207	1,421	1,282	1,225	1,260	735	997	1,030	1,010	1,541	1,494
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1,640	201	132	155	140	133	137	80	109	112	110	168	163
31	MALUKU	150	18	12	14	13	12	13	7	10	10	10	16	15
32	PAPUA	530	65	43	50	45	43	44	26	35	36	36	54	53
33	MALUKU UTARA	250	31	20	24	21	20	21	12	17	17	16	26	25
34	PAPUA BARAT	140	17	11	13	12	11	12	7	9	10	9	15	14
JUMLAH PROPINSI		1,050,000	128,955	84,235	99,123	89,453	85,443	87,909	51,304	69,546	71,892	70,458	107,532	104,150

Lampiran : Surat Direktur Pupuk dan Pestisida
Tanggal : 19 Desember 2022

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	49,110	5,434	3,986	4,842	4,895	4,579	3,929	2,485	2,954	3,108	3,111	4,928	4,859
2	SUMATERA UTARA	128,080	14,171	10,395	12,627	12,767	11,942	10,246	6,480	7,704	8,107	8,113	12,856	12,672
3	SUMATERA BARAT	59,110	6,540	4,797	5,828	5,892	5,511	4,729	2,990	3,555	3,741	3,744	5,935	5,848
4	J A M B I	48,700	5,388	3,952	4,801	4,854	4,541	3,896	2,464	2,929	3,083	3,085	4,889	4,818
5	R I A U	50,080	5,541	4,064	4,937	4,992	4,669	4,006	2,534	3,012	3,170	3,172	5,028	4,955
6	BENGKULU	28,880	3,195	2,344	2,847	2,879	2,693	2,310	1,461	1,737	1,828	1,829	2,899	2,858
7	SUMATERA SELATAN	100,590	11,130	8,164	9,917	10,027	9,379	8,047	5,089	6,050	6,367	6,372	10,096	9,952
8	BANGKA BELITUNG	19,390	2,145	1,574	1,912	1,933	1,808	1,551	981	1,166	1,227	1,228	1,946	1,919
9	LAMPUNG	153,140	16,944	12,429	15,098	15,265	14,278	12,251	7,748	9,211	9,693	9,700	15,371	15,152
10	KEP. RIAU	200	22	16	20	20	19	16	10	12	13	13	20	19
11	DKI. JAKARTA	70	8	6	7	7	7	6	4	4	4	4	7	6
12	BANTEN	27,100	2,998	2,199	2,672	2,701	2,527	2,168	1,371	1,630	1,715	1,717	2,721	2,681
13	JAWA BARAT	330,160	36,530	26,796	32,550	32,910	30,783	26,413	16,703	19,858	20,898	20,913	33,139	32,667
14	D.I. YOGYAKARTA	25,070	2,774	2,035	2,472	2,499	2,337	2,006	1,268	1,508	1,587	1,588	2,516	2,480
15	JAWA TENGAH	421,920	46,683	34,243	41,597	42,057	39,339	33,753	21,346	25,377	26,706	26,726	42,349	41,744
16	JAWA TIMUR	608,090	67,281	49,352	59,952	60,614	56,697	48,647	30,764	36,575	38,490	38,519	61,035	60,164
17	B A L I	23,790	2,632	1,931	2,345	2,371	2,218	1,903	1,204	1,431	1,506	1,507	2,388	2,354
18	KALIMANTAN BARAT	86,770	9,601	7,042	8,555	8,649	8,090	6,942	4,390	5,219	5,492	5,496	8,709	8,585
19	KALIMANTAN TENGAH	34,710	3,840	2,817	3,422	3,460	3,236	2,777	1,756	2,088	2,197	2,199	3,484	3,434
20	KALIMANTAN SELATAN	39,060	4,322	3,170	3,851	3,893	3,642	3,125	1,976	2,349	2,472	2,474	3,921	3,865
21	KALIMANTAN TIMUR	28,590	3,163	2,320	2,819	2,850	2,666	2,287	1,446	1,720	1,810	1,811	2,870	2,828
22	KALIMANTAN UTARA	3,000	332	243	296	299	280	240	152	180	190	190	301	297
23	SULAWESI UTARA	13,090	1,448	1,062	1,291	1,305	1,220	1,047	662	787	829	829	1,314	1,296
24	GORONTALO	18,280	2,023	1,484	1,802	1,822	1,704	1,462	925	1,099	1,157	1,158	1,835	1,809
25	SULAWESI TENGAH	30,130	3,334	2,445	2,971	3,003	2,809	2,410	1,524	1,812	1,907	1,909	3,024	2,982
26	SULAWESI TENGGARA	16,230	1,796	1,317	1,600	1,618	1,513	1,298	821	976	1,027	1,028	1,629	1,607
27	SULAWESI SELATAN	112,800	12,481	9,155	11,121	11,244	10,517	9,024	5,707	6,785	7,140	7,145	11,321	11,160
28	SULAWESI BARAT	19,490	2,156	1,582	1,922	1,943	1,817	1,559	986	1,172	1,234	1,235	1,956	1,928
29	NUSA TENGGARA BARAT	45,320	5,014	3,678	4,468	4,517	4,226	3,626	2,293	2,726	2,869	2,871	4,549	4,483
30	NUSA TENGGARA TIMUR	15,490	1,714	1,257	1,527	1,544	1,444	1,239	784	932	980	981	1,555	1,533
31	MALUKU	2,730	302	222	269	272	255	218	138	164	173	173	274	270
32	PAPUA	6,930	767	562	683	691	646	554	351	417	439	439	696	685
33	MALUKU UTARA	1,740	193	141	172	173	162	139	88	105	110	110	175	172
34	PAPUA BARAT	2,160	239	175	213	215	201	173	109	130	137	137	217	214
	JUMLAH PROPINSI	2,550,000	282,141	206,955	251,406	254,181	237,755	203,997	129,010	153,374	161,406	161,526	255,953	252,296

47/Permentan/SR.310/12/2017
Desember 2017

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	13,840	1,151	930	1,479	1,451	1,296	1,088	676	943	1,006	1,003	1,469	1,348
2	SUMATERA UTARA	31,790	2,645	2,137	3,397	3,333	2,978	2,499	1,553	2,167	2,311	2,305	3,375	3,090
3	SUMATERA BARAT	15,920	1,325	1,070	1,701	1,669	1,491	1,252	778	1,085	1,157	1,154	1,690	1,548
4	J A M B I	6,640	552	446	709	696	622	522	324	453	483	481	705	647
5	R I A U	8,020	667	539	857	841	751	631	392	547	583	581	851	780
6	BENGKULU	5,090	423	342	544	534	477	400	249	347	370	369	540	495
7	SUMATERA SELATAN	15,600	1,298	1,049	1,667	1,635	1,461	1,226	762	1,063	1,134	1,131	1,656	1,518
8	BANGKA BELITUNG	5,720	476	385	611	600	536	450	279	390	416	415	607	555
9	LAMPUNG	28,420	2,365	1,911	3,036	2,979	2,662	2,234	1,388	1,937	2,066	2,060	3,017	2,765
10	KEP. RIAU	100	8.0	7	11.0	10.0	9.0	8.0	5.0	7.0	7.0	7.0	11.0	10.0
11	DKI. JAKARTA	100	8	7	11	10	9	8	5	7	7	7	11	10
12	BANTEN	7,410	617	498	792	777	694	583	362	505	539	537	786	720
13	JAWA BARAT	50,290	4,184	3,381	5,373	5,272	4,711	3,954	2,456	3,428	3,655	3,646	5,339	4,891
14	D.I. YOGYAKARTA	12,370	1,029	832	1,322	1,297	1,159	973	604	843	899	897	1,313	1,202
15	JAWA TENGAH	263,330	21,909	17,703	28,135	27,605	24,668	20,703	12,861	17,951	19,140	19,091	27,957	25,607
16	JAWA TIMUR	424,720	35,337	28,553	45,378	44,524	39,786	33,391	20,744	28,952	30,871	30,791	45,091	41,302
17	B A L I	21,800	1,814	1,466	2,329	2,285	2,042	1,714	1,065	1,486	1,585	1,580	2,314	2,120
18	KALIMANTAN BARAT	19,100	1,589	1,284	2,041	2,002	1,789	1,502	933	1,302	1,388	1,385	2,028	1,857
19	KALIMANTAN TENGAH	2,770	230	186	296	290	259	218	135	189	202	201	294	270
20	KALIMANTAN SELATAN	5,830	485	392	623	611	546	458	285	397	424	423	619	567
21	KALIMANTAN TIMUR	1,650	137	111	176	173	155	130	81	112	120	120	175	160
22	KALIMANTAN UTARA	500	42	34	53	52	47	39	24	34	37	36	53	49
23	SULAWESI UTARA	1,830	152	123	196	192	171	144	89	125	133	133	194	178
24	GORONTALO	1,000	83	67	107	105	94	79	49	68	73	72	106	97
25	SULAWESI TENGAH	4,630	385	311	495	485	434	364	226	316	337	336	492	449
26	SULAWESI TENGGARA	5,780	481	389	618	606	541	454	282	394	420	419	614	562
27	SULAWESI SELATAN	25,140	2,092	1,690	2,686	2,635	2,355	1,976	1,228	1,714	1,827	1,823	2,669	2,445
28	SULAWESI BARAT	1,250	104	84	134	131	117	98	61	85	91	90	133	122
29	NUSA TENGGARA BARAT	12,880	1,072	866	1,376	1,350	1,207	1,013	629	878	936	934	1,366	1,253
30	NUSA TENGGARA TIMUR	3,110	259	209	332	326	291	245	152	212	227	225	330	302
31	MALUKU	600	50	40	64	63	56	47	29	41	45	43	64	58
32	PAPUA	1,950	162	131	208	204	183	153	95	133	143	141	207	190
33	MALUKU UTARA	660	55	44	71	69	62	52	32	45	48	48	70	64
34	PAPUA BARAT	160	13	11	17	17	15	13	8	11	12	11	17	15
	JUMLAH PROPINSI	1,000,000	83,199	67,228	106,845	104,829	93,674	78,621	48,841	68,167	72,692	72,495	106,163	97,246